

Analisis Pembangunan Inklusif dan Industrialisasi terhadap Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam

¹Dita Nabila Anjani, ²Evi Ekawati, ³Dedi Satriawan

^{1,2,3}UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: ditanabilaanjani@gmail.com

Abstract

Indonesia's economic growth has shown a positive trend in the last decade. Income inequality and unequal access to resources are still major issues for people's welfare. Inclusive development and industrialization have emerged as alternative solutions to address these challenges. This study aims to analyze the impact of inclusive development and industrialization on welfare in Indonesia. This type of research is quantitative with an explanatory design, using secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and other official institutions from 2012–2022. The analysis method used is panel data regression. Inclusive development indicators are measured through the inequality index (Gini Ratio), labor force participation rate, and local government social spending. Industrialization is measured by the industrial sector's contribution to GDP, the number of industrial business units, and labor absorption. People's welfare is represented by the Human Development Index (HDI), poverty rate, and open unemployment. The study results show that inclusive development contributes significantly to increasing welfare, mainly through reducing inequality and increasing HDI. Industrialization has a positive impact, but its influence is more maximal if accompanied by a fair economic distribution policy. This study emphasizes the importance of integrating industrialization strategies and inclusive approaches to achieve sustainable and equitable prosperity.

Keywords: *Inclusive Development, Islamic Economics, Public Welfare*

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif dalam satu dekade terakhir. Ketimpangan pendapatan dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya masih menjadi isu utama bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan inklusif dan industrialisasi muncul sebagai solusi alternatif untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan inklusif dan industrialisasi terhadap kesejahteraan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain eksplanatori, menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga resmi lainnya dari tahun 2012–2022. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Indikator pembangunan inklusif diukur melalui indeks ketimpangan (*Gini Ratio*), tingkat partisipasi angkatan kerja, dan belanja sosial pemerintah daerah. Industrialisasi diukur dari kontribusi sektor industri terhadap PDB, jumlah unit usaha industri, dan penyerapan tenaga kerja. Kesejahteraan masyarakat diwakili oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan pengangguran terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan inklusif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan, terutama melalui pengurangan ketimpangan dan peningkatan IPM. Industrialisasi memberikan dampak positif, namun pengaruhnya akan lebih maksimal jika disertai dengan kebijakan pemerataan ekonomi. Studi ini menekankan pentingnya mengintegrasikan strategi industrialisasi dan pendekatan inklusif untuk mencapai kemakmuran yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan Inklusif*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang terus mendorong pertumbuhan ekonominya melalui berbagai kebijakan strategis. Namun demikian, capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama beberapa dekade terakhir tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu fenomena mencolok yang masih dihadapi adalah tingginya ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah serta keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, terutama di kalangan kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Data menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Indonesia masih cukup tinggi, menandakan bahwa distribusi pendapatan belum merata.¹

Persoalan ini memperlihatkan bahwa orientasi kebijakan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan belum cukup efektif dalam menghadirkan pemerataan hasil pembangunan. Sebagai alternatif, pembangunan inklusif dipandang sebagai pendekatan strategis yang dapat menjembatani persoalan ketimpangan dan keterlibatan masyarakat secara luas. Pembangunan inklusif menekankan pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik, agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil. Di sisi lain, industrialisasi sebagai salah satu pilar transformasi ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah produk domestik. Namun, dalam praktiknya, kedua pendekatan ini kerap kali berjalan secara terpisah dan belum sepenuhnya disinergikan dalam kerangka pembangunan nasional. Akibatnya, pertumbuhan industri tidak selalu menciptakan efek ganda yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.²

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pembangunan inklusif memiliki peran penting dalam meningkatkan indikator kesejahteraan, seperti indeks pembangunan manusia, penurunan kemiskinan, dan perbaikan distribusi pendapatan. Sementara itu, industrialisasi di negara berkembang seperti Indonesia terbukti berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, meskipun belum menyentuh sektor-sektor informal atau masyarakat di wilayah terpencil secara maksimal. Namun demikian, belum banyak kajian yang mengkaji secara simultan keterkaitan antara pembangunan inklusif dan industrialisasi dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, masih minimnya kajian yang memasukkan nilai-nilai Islam, seperti keadilan sosial, pemerataan, dan

¹ Adika, N. D., & Rahmawati, F. (2021). Analisis indikator ketimpangan gender dan relevansinya terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. *Ecoplan*, 4(2), 151-162.

² Akbar, A. M. (2023). Hubungan Kausalitas Produk Dsomestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di Indonesia. *Independent: Journal Of Economics*, 3(1), 138-149.

kepedulian terhadap kelompok marginal, menjadi celah penting dalam literatur yang dapat diisi oleh penelitian ini.³

Kekosongan inilah yang mendorong pentingnya posisi dan urgensi kajian ini. Kajian ini berusaha mengintegrasikan dua pendekatan utama pembangunan, pembangunan inklusif dan industrialisasi, dalam satu kerangka analisis empiris untuk mengkaji pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Di sisi lain, dimensi normatif Islam juga menjadi kerangka penting dalam menilai kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan dan keberpihakan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur pembangunan dan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pembangunan inklusif dan industrialisasi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain studi eksplanatori. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari sumber resmi, seperti Badan Pusat Statistik dan lembaga internasional yang relevan dalam rentang waktu 2012–2022.

Analisis dilakukan menggunakan regresi panel untuk melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap indikator kesejahteraan, seperti indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan.⁴ Dengan mengintegrasikan pendekatan pembangunan inklusif, industrialisasi, dan perspektif Islam, kajian ini menawarkan suatu model alternatif pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan kontekstual dengan realitas sosial-ekonomi Indonesia. Penelitian ini berakar dari tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Transformasi ekonomi dari sektor agraris menuju industri telah membuka berbagai peluang, namun juga menimbulkan ketimpangan sosial dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya. Meskipun terdapat kemajuan dalam aspek pembangunan inklusif, masih banyak kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses industrialisasi. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai efektivitas strategi pembangunan nasional saat ini dalam menciptakan kesejahteraan yang merata.⁵

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa industrialisasi yang bersifat inklusif dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa studi terdahulu mengindikasikan bahwa penguatan partisipasi masyarakat dan peningkatan akses terhadap sektor industri

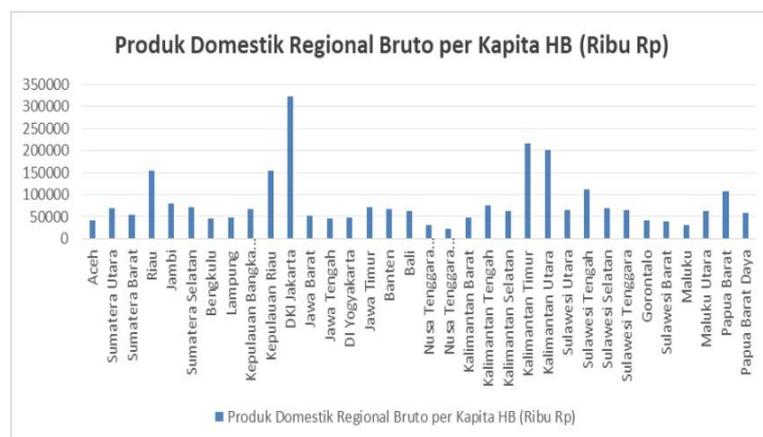
³ Amrullah, R. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Anggaran Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Kabupaten Di Pulau Madura. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 6(1), 90–98.

⁴ Andrianto, A. D. (2023). Transformasi Pertanian Masa Orde Baru dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 11(2), 14–20.

⁵ Kamaruddin, S. A. (2024). Dampak Pembangunan Industri di Pedesaan. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*.

berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita. Namun demikian, terdapat *gap* dalam literatur mengenai integrasi antara pembangunan inklusif, industrialisasi, dan pendekatan keislaman dalam konteks kebijakan pembangunan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) untuk menganalisis data panel dari seluruh provinsi di Indonesia pada periode 2012 hingga 2021.⁶ Metode ini dipilih karena mampu menangkap dinamika hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi peran industrialisasi dan pembangunan inklusif terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.⁷



Sumber: <https://www.bps.go.id/pdb>

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku merupakan indikator penting dalam menilai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tingginya nilai PDRB per kapita umumnya mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan kerja, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik. Oleh karena itu, studi ini menilai korelasi antara peningkatan PDRB per kapita dengan keberhasilan penerapan pembangunan yang inklusif dan berbasis industrialisasi. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji pendekatan keislaman sebagai perspektif normatif yang mendasari prinsip-prinsip keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.⁸ Nilai-nilai ini dinilai selaras dengan tujuan pembangunan inklusif yang tidak hanya

⁶ Setiawan, A. B., Prasetyo, F. H., Yusuf, M., Prajanti, S. D. W., Bowo, P. A., & Fafurida, F. (2024). Pembangunan Inklusif dan Industrialisasi di Indonesia: Dampaknya terhadap Kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 24(2), 4.

⁷ Bintoro, C. S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung Di Indonesia. *Jurnal Economina*, 1(3), 547–562.

⁸ Adib, M.A. (2022). Upaya Dialogisasi Pendekatan Normatif dan Historis dalam Studi Islam: Konsep Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah. *Al-Tarbawi Al-Hadits: Jurnal Pendidikan Islam*,

mementingkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keseimbangan sosial dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, integrasi prinsip Islam dalam perumusan strategi pembangunan diharapkan dapat memperkuat keadilan distribusi manfaat pembangunan.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan: sejauh mana pembangunan inklusif berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia? Bagaimana peran industrialisasi dalam memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara nasional? Apakah terdapat hubungan yang saling memperkuat antara pembangunan inklusif dan industrialisasi dalam menciptakan kesejahteraan yang merata? Bagaimana implementasi pembangunan inklusif dan industrialisasi selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam perspektif Islam?

B. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan metode ekonomi untuk menganalisis dampak pembangunan terpadu dan industrialisasi di sumur Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan hubungan sebab akibat antara variabel yang diselidiki oleh analisis data statistik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari berbagai formula dan sumber terkait. Sumber -sumber utama data berasal dari data yang terkait dengan Biro Statistik Pusat (BPS), khususnya produk domestik bruto (PDB), pertumbuhan sektor industri, pengangguran, distribusi pendapatan, dan indeks pengembangan HDI (Indeks Pembangunan Manusia). Data BPS telah dipilih karena memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dan area nasional yang komprehensif dan secara teratur diperbarui untuk memberikan situasi yang akurat tentang kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia selama periode penelitian.¹⁰

Selain data dari BPS, penelitian ini memanggil laporan dan jurnal akademik yang mendukung sumber untuk memperkuat alasan dan membangun argumen yang terkait dengan pengetahuan empiris. Pemilihan jurnal akademik didasarkan pada relevansi topik, kualitas metodologis, dan kualitas jurnal (misalnya, jurnal yang diindeks oleh pengindeks internasional seperti Scopus dan terindeks Sinta). Laporan yang digunakan termasuk publikasi dari lembaga penelitian atau lembaga *think tank* yang berspesialisasi dalam masalah pengembangan dan industrialisasi terintegrasi. Misalnya, kombinasi data statistik kuantitatif dari BPS dan hasil kualitatif dan laporan dari jurnal memungkinkan analisis komprehensif dan triangulasi data yang dapat meningkatkan validitas penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya menjelaskan hubungan antara variabel numerik, tetapi juga memahami konteks sosial ekonomi

⁹ Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. W., & Ramdhani, A. (2024). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 213-218.

¹⁰ Febriaty, H., Rahayu, S. E., & Nasution, E. Y. (2022). Peran Inklusi Keuangan dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 125–135.

berdasarkan dinamika pembangunan Indonesia. Data yang dikumpulkan adalah data tahunan dalam bentuk data deret waktu dan aplikasi pemrosesan data, yaitu, data panel kombinatorial antara bagian menggunakan aplikasi. Periode dari 2014-2024 untuk memastikan perubahan signifikan dalam pengembangan dan industrialisasi terintegrasi.¹¹ Penelitian ini menggunakan beberapa variabel utama sebagai berikut:

Tabel 1. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Rumus
Kesejahteraan = Y	Kondisi di mana individu atau masyarakat memiliki kualitas hidup yang baik, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan spiritual.	Pendapatan Pekapita	Pendapatan per kapita: (Total pendapatan suatu wilayah) / (Jumlah penduduk)
Pembangunan Inklusif = X1	Proses pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, memberikan kesempatan yang setara bagi semua, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.	Persentase penduduk miskin.	Persentase penduduk miskin: (Jumlah penduduk miskin / Total penduduk) x 100%
Industrialisasi X2	= Proses transformasi suatu perekonomian dari berbasis agraris menjadi berbasis industri, ditandai dengan peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDB total PDB. dan lapangan kerja.	Kontribusi sektor industri terhadap PDB:	Kontribusi sektor industri terhadap PDB: Proporsi nilai (Nilai tambah sektor industri / PDB) x 100%

Tabel 1 menyajikan definisi operasional dari tiga variabel utama dalam penelitian ini, yaitu Kesejahteraan (Y), Pembangunan Inklusif (X1), dan Industrialisasi (X2). Masing-masing variabel dijelaskan melalui dimensi konseptual, indikator yang mewakili, serta rumus pengukurannya. Variabel kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi kualitas hidup yang baik yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah pendapatan per kapita, yang dihitung dengan membagi total pendapatan wilayah dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita digunakan karena secara umum dianggap sebagai indikator utama dalam menilai taraf hidup masyarakat suatu wilayah.¹² Sementara itu, pembangunan inklusif (X1) didefinisikan sebagai proses pembangunan yang menjamin partisipasi aktif dari seluruh kelompok masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, untuk memperoleh kesempatan yang adil.

¹¹ Fitriana, A., Sofiana, M., Nisa, S. N., Arsibal, S. P., & Khoiriawati, N. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 158–168.

¹² Rusyidi, B. (2017). Definisi Kekerasan Terhadap Istri di Kalangan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 1-12.

Indikator yang digunakan adalah persentase penduduk miskin, karena kelompok ini dianggap sebagai representasi dari segmen masyarakat yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Semakin rendah persentase penduduk miskin, maka pembangunan dapat dikatakan semakin inklusif.¹³ Variabel ketiga, yaitu industrialisasi (X2), merujuk pada perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri. Indikator yang digunakan adalah kontribusi sektor industri terhadap PDB, yang mencerminkan sejauh mana sektor industri berperan dalam pembentukan produk domestik bruto. Proporsi ini menunjukkan tingkat kemajuan industrialisasi suatu wilayah, dan semakin tinggi kontribusinya, semakin kuat peran sektor industri dalam mendorong perekonomian. Dengan penjelasan ini, Tabel 1 tidak hanya menjadi alat bantu visual, tetapi juga memberikan kerangka pemahaman konkret mengenai bagaimana masing-masing variabel didefinisikan dan diukur dalam konteks penelitian ini.¹⁴

Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode regresi data panel, karena data yang digunakan merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dinamika hubungan antar variabel dalam dimensi waktu dan antar unit pengamatan, yaitu kabupaten/kota di wilayah studi. Dalam proses analisis, digunakan tiga pendekatan model regresi panel, yaitu:

1. *Common Effect Model* (CEM)

Model ini merupakan teknik paling sederhana yang digunakan dalam estimasi data panel. CEM menggabungkan data *time series* dan *cross section* tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan antar unit maupun waktu. Model ini digunakan sebagai model awal untuk mengidentifikasi hubungan dasar antar variabel yang diamati.

2. *Random Effect Model* (REM)

Model ini digunakan untuk mengestimasi data panel dengan asumsi bahwa variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu. REM mengasumsikan bahwa setiap *intercept* berbeda, tetapi berasal dari distribusi acak yang sama. Dalam penelitian ini, REM digunakan untuk melihat apakah variasi antar kabupaten/kota dapat dijelaskan melalui efek acak.

3. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model ini mempertimbangkan adanya perbedaan yang tetap antar unit pengamatan. FEM mengasumsikan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik khusus yang

¹³ Ilham, A. N., & Octaviani, D. (2024). Analisis Peran Faktor-Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 771–780.

¹⁴ Mediana, H., & Maryunani.(2021). Analisis Pengaruh PDRB sektor pertanian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Transportasi Dan Pergudangan Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2012-2017 (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*,(9), 20–32.

memengaruhi hubungan antar variabel dan tidak berubah selama periode pengamatan.

Dalam penelitian ini, FEM digunakan sebagai model utama yang diuji kelayakannya.

Untuk memilih model terbaik, dilakukan uji Hausman. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah model FEM atau REM yang paling sesuai digunakan. Berdasarkan hasil uji Hausman yang telah dilakukan dalam penelitian, diperoleh hasil bahwa model *Fixed Effect* merupakan model yang paling tepat karena mampu menangkap pengaruh karakteristik khusus masing-masing kabupaten/kota terhadap variabel dependen yang diteliti.¹⁵

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan dalam analisis regresi panel, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Random Effect Model* (REM), dan *Fixed Effect Model* (FEM). Ketiga model ini diuji untuk melihat pendekatan mana yang paling tepat dalam menjelaskan hubungan antara pembangunan inklusif, industrialisasi, dan kesejahteraan di Indonesia. Untuk menentukan model terbaik, dilakukan uji spesifikasi model melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil dari kedua uji tersebut menunjukkan bahwa model *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini. Model ini mampu menangkap variasi spesifik antar wilayah yang tidak berubah sepanjang waktu dan berkontribusi signifikan terhadap variabel kesejahteraan. Hal ini menandakan bahwa perbedaan karakteristik antar daerah di Indonesia berperan penting dalam mempengaruhi hasil analisis hubungan variabel-variabel tersebut.¹⁶

Tabel 2. Hasil Penelitian REM (*Random Effect Model*)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Probabilitas
C	229,268.59	21,875.59	10.4806	0.0000
LOG(PI)	1.9942	0.2350	8.4863	0.0000
LOG(I)	0.2786	0.1727	1.6129	0.1076
Statistik Model		Nilai		
R-squared	0.1664			
Adjusted R-squared	0.1664			

Tabel 2 menampilkan hasil estimasi menggunakan pendekatan REM yang menunjukkan bahwa konstanta (C) memiliki nilai koefisien sebesar 229.268, dengan nilai *t-statistic* 10,48 dan nilai probabilitas sangat kecil ($p < 0,01$), yang berarti signifikan secara statistik. Variabel logaritma pembangunan inklusif (LOG(PI)) juga menunjukkan pengaruh yang signifikan

¹⁵ Nazikha, R. S., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan (JEBP)*, 1(2), 120–134.

¹⁶ Fajar, I. (2021). Kesenjangan digital tingkat ketiga pada pemuda pedesaan di Kabupaten Cianjur, Indonesia. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 10(1), 44-54.

terhadap kesejahteraan, dengan koefisien 1,994 dan nilai *t-statistic* 8,49 serta nilai probabilitas yang sangat kecil, jauh di bawah ambang batas signifikansi 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pembangunan inklusif secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, variabel logaritma industrialisasi (LOG(I)) memiliki koefisien sebesar 0,279, namun dengan nilai *t-statistic* sebesar 1,61 dan tingkat signifikansi 0,1076, yang berarti tidak signifikan secara statistik pada taraf kepercayaan 95%.¹⁷ Nilai *R-squared* dan *adjusted R-squared* dari model ini sebesar 0,166, yang menunjukkan sekitar 16,6% variasi dalam kesejahteraan dapat dijelaskan oleh dua variabel independen tersebut dalam model REM.

Meski demikian, mengingat hasil uji Hausman lebih mendukung penggunaan model FEM, maka model REM tidak digunakan sebagai model utama dalam penelitian ini. Di sisi lain, variabel industrialisasi tetap menunjukkan efek positif terhadap kesejahteraan sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien sebesar 0,319 dan tingkat signifikansi 0,021. Ini menunjukkan bahwa industrialisasi tetap berperan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan, meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan dengan pembangunan inklusif. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa peningkatan kesejahteraan sangat bergantung pada distribusi hasil pembangunan yang merata dan adil di tengah masyarakat. Gabungan variabel pembangunan dan industrialisasi hanya mampu menjelaskan sekitar 16,9% dari variasi faktor antededen kesejahteraan. Artinya, masih terdapat faktor lain yang belum diperhitungkan, seperti investasi dalam sumber daya manusia, kebijakan sosial, dan distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan hanya akan efektif jika disertai dengan kebijakan redistributif yang mampu memaksimalkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Dengan demikian, kebijakan ekonomi harus memberikan penekanan khusus pada strategi pembangunan inklusif melalui pemerataan akses terhadap peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Industrialisasi pun harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dalam kerangka ekonomi berkeadilan, distribusi manfaat pembangunan dan tanggung jawab sosial perlu dijadikan fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian ini membuktikan bahwa meskipun pembangunan inklusif dan industrialisasi telah meningkatkan kesejahteraan, keduanya perlu ditopang oleh sistem dan kebijakan yang memastikan pemerataan hasil pembangunan secara menyeluruh.¹⁹ Hasil penelitian ini dapat

¹⁷ Simatupang, B. (2012). Economic transformation and liberalization in Indonesia. In *Liberalization in the Developing World* (pp. 65–85). Routledge.

¹⁸ Sirega, M. F., Nasution, A., Madinah, F., & Zakia, M. U. (2023a). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 53–62.

¹⁹ Heppi Syofya, S. E., Sari, D. D. P., Apriyasni Melati, S. E., Dev, M. E., Eliza, S. E., Meimoon Ibrahim, S. E., ... & SE, M. (2025). *Ekonomi Pembangunan*. CV Rey Media Grafika.

dijadikan landasan untuk menyusun strategi kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial.

Tabel 3. Chow Test

Effect Test	Statistis	Df	Probabilitas
Cross-section F	8.624707585007328	33,338	1.200833402544559e-28
Cross-section chi-square	228.4702485019043	33	4.282495938966231e-31

Tabel 3 menunjukkan hasil uji Chow untuk membandingkan model CEM dengan FEM. Nilai *F-statistic* untuk efek *cross-section* sebesar 8,62 dengan derajat bebas (df) 33 dan 338, serta nilai probabilitas yang sangat kecil, yaitu $1,20 \times 10^{-28}$. Selain itu, nilai *chi-square cross-section* sebesar 228,47 dengan probabilitas sebesar $4,28 \times 10^{-31}$, juga menunjukkan signifikansi yang tinggi. Hasil ini mengindikasikan bahwa model FEM secara statistik lebih unggul dibandingkan CEM dalam menjelaskan variasi data panel yang digunakan. Dengan kata lain, terdapat perbedaan signifikan antar unit *cross-section* (kabupaten/kota), sehingga model yang mempertimbangkan efek tetap lebih tepat digunakan dibandingkan model umum. Berdasarkan hasil uji ini, maka CEM ditolak dan FEM dipertimbangkan lebih lanjut dalam proses analisis.²⁰

Tabel 4. Lagrange Multiplier (LM) Test Result

	Cross-section	Test Hypothesis	
		Time	Both
Breusch-Pagan	1.874324172011494 (0.0398)	4344.523475573848 (0.0000)	4346.3977997 (0.0000)

Hasil uji Hausman yang ditampilkan dalam Tabel 4 digunakan untuk menentukan model terbaik antara FEM dan REM. Berdasarkan nilai probabilitas dari uji Hausman, diketahui bahwa nilai *cross-section random* lebih besar dari 5%, yang berarti hipotesis nol (H_0) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model *random effect* lebih sesuai digunakan karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara estimasi REM dan FEM.²¹ Dengan diterimanya model REM, maka dapat disimpulkan bahwa variasi individual dalam data dapat dianggap acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen dalam model. Oleh karena itu, pendekatan REM dipilih sebagai model terbaik untuk menjelaskan hubungan antara pembangunan inklusif,

²⁰ Pratama, E. P. P. A., Choirunnisa, A., Septina, Z., & Setiyawati, M. E. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(4), 570–577.

²¹ Yolanda, C. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186.

industrialisasi, dan kesejahteraan dalam penelitian ini. Meski demikian, pemilihan model tetap dikonfirmasi dengan pengujian tambahan seperti uji LM.²²

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep keseimbangan (*tawazun*) menjadi prinsip utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. *Tawazun* mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan, serta antara material dan spiritual. Dalam konteks pembangunan nasional, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, prinsip ini sangat relevan untuk memastikan bahwa pembangunan dan industrialisasi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.²³ Muhammad Umer Chapra, tokoh utama dalam ekonomi Islam kontemporer, mengemukakan bahwa tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan (*falāh*) melalui sistem yang adil dan seimbang. Dalam bukunya *Islam and the Economic Challenge*, Chapra menjelaskan bahwa sistem ekonomi harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat, menghapuskan kemiskinan, dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Industrialisasi, dalam pandangan ini, bukan hanya alat pencipta pertumbuhan, tetapi juga harus menjadi mekanisme pemberdayaan ekonomi rakyat.²⁴

Teori Chapra mengenai kesejahteraan ekonomi menekankan pentingnya keadilan sosial, etika dalam ekonomi, dan nilai-nilai spiritual dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Ia berpendapat bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari kebahagiaan dan keseimbangan sosial. Hal ini sejalan dengan Surah Al-Baqarah ayat 155 "*Dan sungguh, Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.*"²⁵ Ayat tersebut menafsirkan bahwa Allah akan menguji umat-Nya dengan berbagai cobaan, seperti ketakutan dan kelaparan, serta pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian tersebut.²⁶ Salah satu poin penting dalam ayat ini adalah penekanan pada kesabaran. Allah SWT memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang berarti bahwa kesabaran adalah sifat yang sangat dihargai dalam Islam. Kesabaran bukan hanya sekadar menunggu, tetapi juga mencakup ketahanan emosional dan mental dalam menghadapi cobaan. Dalam tafsir, dijelaskan bahwa sabar merupakan salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah dan mendapatkan pahala yang besar.

²² Ramadhan, Y. M. (2023). Peran UMKM dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Benefit: Journal of Business, Economics, and Finance*, 1(2), 99–108.

²³ Nasution, M. Arief. (2005). "Prinsip Tawazun dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 45–60.

²⁴ Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.

²⁵ quran.kemenag.go.id

²⁶ Tafsir Kementerian Agama (Kemenag RI)

Ujian yang diberikan oleh Allah tidaklah sia-sia. Setiap kesulitan yang dialami umat-Nya dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas spiritual dan moral. Dalam banyak tafsir, dijelaskan bahwa ujian juga berfungsi untuk membersihkan jiwa dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya bersyukur. Dengan demikian, cobaan dapat menjadi pengingat bagi manusia untuk selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah. Kesejahteraan sejati, menurut Chapra, melibatkan ketahanan terhadap ujian, dan ayat ini menegaskan bahwa kesabaran adalah kunci dalam mencapai kesejahteraan. Selain itu, integrasi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari memperkuat karakter individu dan masyarakat. Dengan demikian, baik teori Chapra maupun ayat Al-Qur'an ini menggaris bawahi pentingnya keadilan, kesabaran, dan nilai-nilai moral sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pendekatan pembangunan inklusif yang sejalan dengan *tawazun* menekankan pentingnya pelibatan semua lapisan masyarakat, termasuk UMKM, pekerja informal, dan komunitas marjinal. Dalam konteks Indonesia, industrialisasi sering kali terpusat di kawasan perkotaan dan sektor-sektor besar, sementara wilayah-wilayah tertinggal tidak menikmati manfaat yang sama. Chapra menekankan bahwa negara perlu memainkan peran aktif dalam intervensi sosial dan ekonomi untuk memastikan agar tidak terjadi eksklusi dan agar distribusi kekayaan tidak hanya berputar di antara kelompok elite (Chapra, 1992).²⁷ Lebih jauh, Chapra juga menyoroti pentingnya prinsip keadilan (*adl*) dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*) dalam pembangunan. Industrialisasi yang Islami harus memperhatikan aspek keberlanjutan, kesejahteraan pekerja, dan tanggung jawab lingkungan. Ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang juga diadopsi Indonesia, tetapi dalam ekonomi Islam ditopang oleh landasan spiritual yang kuat. Dengan prinsip *tawazun*, pembangunan tidak sekadar dilihat dari sisi *output* ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu menjaga keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan material.²⁸

Dengan demikian, teori keseimbangan (*tawazun*) dalam ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan oleh Chapra dan Qs.Al-Baqarah :155 memberikan landasan konseptual yang kuat untuk merancang strategi pembangunan dan industrialisasi yang lebih inklusif di Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan harus menjangkau seluruh elemen masyarakat secara adil, memberdayakan kelompok rentan, menjaga nilai-nilai moral dan lingkungan.²⁹ Dalam era ini di mana ketimpangan dan kerusakan lingkungan menjadi ancaman serius, pendekatan ini menjadi solusi yang relevan dan aplikatif dalam mendorong kesejahteraan

²⁷ Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.

²⁸ Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

²⁹ Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

masyarakat Indonesia secara holistik. Konsep kesejahteraan dalam Islam, yang diungkapkan melalui Surah Al-Baqarah ayat 155 tersebut, mengajarkan bahwa ujian dan cobaan, termasuk ketimpangan sosial dan dampak lingkungan, merupakan bagian dari rencana Allah untuk menguji ketahanan iman umat-Nya. Dalam konteks ini, kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan mendorong keadilan sosial menjadi sangat relevan. Integrasi nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan tanggung jawab sosial, dapat menciptakan solusi yang tidak hanya mengatasi ketimpangan ekonomi, tetapi juga melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, melalui kesabaran dan usaha kolektif untuk memperbaiki keadaan, masyarakat dapat menemukan jalan menuju kesejahteraan yang berkelanjutan, selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan inklusif dan industrialisasi secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan di Indonesia, dengan pembangunan inklusif memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan industrialisasi. Indikator kesejahteraan yang digunakan mencerminkan dimensi ekonomi dan sosial, seperti pendapatan, ketimpangan, dan akses terhadap layanan dasar. Temuan ini menguatkan pentingnya pendekatan yang adil dan menyeluruh dalam strategi pembangunan nasional, sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Kajian ini memiliki keterbatasan pada aspek kedalaman variabel sosial-budaya dan lingkungan yang belum dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian diperluas dengan memasukkan dimensi sosial, institusional, serta perspektif spasial agar hasilnya dapat lebih komprehensif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Referensi

- Adib, M.A. (2022). Upaya Dialogisasi Pendekatan Normatif dan Historis dalam Studi Islam: Konsep Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah. *Al-Tarbawi Al-Hadits: Jurnal Pendidikan Islam* ,
- Adika, N. D., & Rahmawati, F. (2021). Analisis indikator ketimpangan gender dan relevansinya terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. *Ecoplan*, 4(2), 151-162.
- Akbar, A. M. (2023). Hubungan Kausalitas Produk Dsometik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di Indonesia. *Independent: Journal Of Economics*, 3(1), 138–149.

- Amrullah, R. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Anggaran Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Kabupaten Di Pulau Madura. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 6(1), 90–98.
- Andrianto, A. D. (2023). Transformasi Pertanian Masa Orde Baru dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 11(2), 14–20.
- Fajar, I. (2021). Kesenjangan digital tingkat ketiga pada pemuda pedesaan di Kabupaten Cianjur, Indonesia. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 10(1), 44-54.
- Bintoro, C. S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung Di Indonesia. *Jurnal Economina*, 1(3), 547–562.
- Febriaty, H., Rahayu, S. E., & Nasution, E. Y. (2022). Peran Inklusi Keuangan dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 125–135.
- Fitriana, A., Sofiana, M., Nisa, S. N., Arsibal, S. P., & Khoiriawati, N. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 158–168.
- Heppi Syofya, S. E., Sari, D. D. P., Apriyasni Melati, S. E., Dev, M. E., Eliza, S. E., Meimoon Ibrahim, S. E., ... & SE, M. (2025). *Ekonomi Pembangunan*. CV Rey Media Grafika.
- Ilham, A. N., & Octaviani, D. (2024). Analisis Peran Faktor-Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 771–780.
- Kamaruddin, S. A. (2024). Dampak Pembangunan Industri di Pedesaan. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*.
- Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. W., & Ramdhani, A. (2024). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 213-218.
- Mediana, H., Maryunani.(2021). Analisis Pengaruh PDRB sektor pertanian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Transportasi Dan Pergudangan Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2012-2017 (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*,(9), 20–32.
- Nazikha, R. S., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan (JEBP)*, 1(2), 120–134.
- Pratama, E. P. P. A., Choirunnisa, A., Septina, Z., & Setiyawati, M. E. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(4), 570–577.
- Ramadhan, Y. M. (2023). Peran UMKM dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 1(2), 99–108.
- Rusyidi, B. (2017). Definisi Kekerasan Terhadap Istri di Kalangan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 1-12.
- Setiawan, A. B., Prasetyo, F. H., Yusuf, M., Prajanti, S. D. W., Bowo, P. A., & Fafurida, F. (2024). Pembangunan Inklusif dan Industrialisasi di Indonesia: Dampaknya terhadap Kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 24(2), 4.
- Simatupang, B. (2012). Economic transformation and liberalization in Indonesia. In *Liberalization in the Developing World* (pp. 65–85). Routledge.
- Sirega, M. F., Nasution, A., Madinah, F., & Zakia, M. U. (2023a). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 53–62.
- Yolanda, C. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186.